

PEMENUHAN HAK ATAS UPAH DAN WAKTU KERJA BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS PADA USAHA MIKRO KAFE X DI KABUPATEN SLEMAN

INTISARI

Oleh:

Sarah Nasio Pardede¹, Nailul Amany, S.H., M.H²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pemenuhan hak atas upah dan waktu kerja bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada Usaha Mikro Kafe X di Kabupaten Sleman serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada Usaha Mikro Kafe X di Kabupaten Sleman jika tidak terpenuhinya hak atas upah dan waktu kerja.

Metode penelitian dalam skripsi ini berjenis normatif-empiris dan bersifat kualitatif. Bahan penelitian yang digunakan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan *supervisor* dan pekerja/buruh di Kafe X menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil analisis data kemudian disimpulkan serta disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak atas upah dan waktu kerja bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada Usaha Mikro Kafe X di Kabupaten Sleman tidak sejalan dengan PP Pengupahan, yakni lebih rendah dari rata-rata konsumsi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada Usaha Mikro Kafe X di Kabupaten Sleman jika tidak terpenuhinya hak atas upah dan waktu kerja dapat dilakukan melalui sarana perlindungan preventif dan represif. Pelindungan secara preventif telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan sebagai dasar hukum pengupahan terhadap sektor Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan pelindungan hukum represif dapat dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak atas Upah dan Waktu Kerja, Usaha Mikro dan Kecil, Perjanjian Kerja Lisan, Upaya Hukum

¹ Mahasiswa Program Sarjana pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***FULFILLMENT OF RIGHTS TO WAGES AND WORKING HOURS FOR
WORKERS/LABORERS WITH ORAL EMPLOYMENT CONTRACT AT
MICRO BUSINESS CAFE X IN SLEMAN REGENCY.***

ABSTRACT

By :

Sarah Nasio Pardede¹, Nailul Amany, S.H., M.H²

This research aims to understand and analyze the process of fulfilling the rights to wages and working hours for workers with oral employment contract at Micro Business cafe X in Sleman Regency, as well as to understand and analyze the legal efforts made by workers with oral employment contract at Micro Business Cafe X in Sleman Regency if their rights to wages and working hours are not fulfilled.

The research method used in this thesis is normative-empirical and qualitative, based on secondary and primary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Meanwhile, primary data in this study was obtained through interviews with supervisors and workers at Cafe X. The sample in this study was conducted using purposive sampling techniques based on criteria for the cafe and cafe workers.

The results of the study show that the process of fulfilling the rights to wages and working hours for workers with oral employment contract at Micro Business Cafe X in Sleman Regency is not in line with the Wage Regulation, which is lower than the average consumption of the community in Yogyakarta Special Region. Legal efforts made by workers with oral employment contract at Micro Business Cafe X in Sleman Regency if their rights to wages and working hours are not fulfilled can be carried out through preventive and repressive protection means. Preventive protection has been carried out by the government through regulations such as the Government Regulation on Wages as the legal basis for wages in the Micro and Small Business sectors. Meanwhile, repressive legal protection can be carried out through the process of settling industrial relations disputes, the provisions of which have been regulated in the Industrial Relations Dispute Settlement Law.

Keywords: Fulfillment of Wages and Working Hours, Micro and Small Businesses, Oral Employment Contract, Legal Remedies

¹ Bachelor Degree Student at Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Lecturer at Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.